PAPER NAME

Artikel Dari Udin.pdf

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
2525 Words	**17405 Characters**
PAGE COUNT	FILE SIZE
7 Pages	**43.4KB**
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Oct 24, 2022 10:22 AM GMT+7	**Oct 24, 2022 10:23 AM GMT+7**

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Bibliographic material
- Cited material
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less then 8 words)

STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU MENURUT UU NO23 TAHUN 1997

Dwi Edi Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup tersebut akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup Di era sekarang ini tampak bahwa ada kecenderungan permasalahan lingkungan tambah kompleks, yang seharusnya tidak demikian. Terdapat banyak hal menyebabkan aspek lingkungan menjadi kurang diperhatikan, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain dari hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan tenologi yang tidak ramah lingkungan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian di dalam pelaksanaanya termasuk dalam pengawasan pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena pembangunan pada dasamya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu di dengar dan program kegiatan pembangunan betul betul yang menyentuh masyarakat Pengelolaan wilayah pesisir temasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulian kualitas wilayah pesisir telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Semuanya terkait satu sama lain untuk mewujudkan wilayah pesisir yang sehat, rapi, indah yang sesuai dengan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaaan, Pesisir dan Lautan

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan oleh bangsa Indonesia telah dilakukan sejak berabad - berabad lamanya, sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Sementara itu, kekayaan minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan sudah selayaknya dikelola dengan baik dan optimal untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mengantarkan bangsa ini menjadi makmur, adil dan sejahtera.

Dalam kaitannya dengan sumberdaya pesisir dan lautan, pemerintah dan bangsa Indonesia di era reformasi mulai sadar untuk menjadikan pembangunan berbasis kelautan menjadi pijakan yang kuat dan strategis. Arti strategis ini dilandasi tiga hal pokok yaitu:

a. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sebanyak 17.508 pulau (pulau besar dan kecil) dengan kekayaan lautan yang luar biasa dan beragam, maka sudah seharusnya arus utama pembangunan berbasis pesisir dan lautan akan memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan

b. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk, serta semakin menipisnya sumberdaya alam daratan, maka sumberdaya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa
c. Dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan merupakan prioritas utama untuk pusat pengembangan industri, pariwisata, agribisnis, agroindustri pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi demikian bagi kota-kota yang terletak di wilayah industri terus dikembangkan menuju tata ekonomi baru dan industrialisasi.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, salah satunya adalah sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya pesisir dan lautan yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan.

Menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang baik dan bijaksana. Kerusakan sumberdaya pesisir dan lautan banyak ditentukan oleh aktifitas manusia. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumberdaya pesisir dan lautan, namun eksploitasi sumberdaya pesisir dan lautan yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan merosotnya kualitas sumberdaya pesisir dan lautan.

POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN

Suatu kenyataan yang sebenarnya telah kita pahami bersama, jika sumberdaya pesisir dan lautan memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri seksama, persoalan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan selama ini tidak optimal dan berkelanjutan disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor internaldan eksternal. **Faktor internal** adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya masyarakat pesisir seperti:

1. Rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya, teknologi dan manajemen usaha
2. Pola usaha tradisonal dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek)
3. Keterbatasan kemampuan modal usaha
4. Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir dan nelayan

Faktor eksternal yaitu:

1. Kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bersifat sektoral, parsial dan kurang memihak nelayan
2. Belum kondisinya kebijakan ekonomi makro, suku bunga yang masih tinggi serta belum adanya program kredit lunak yang diperuntukkan bagi sektor kelautan

3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, eksploitasi dan perusakan terumbu karang, serta penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan
4. Sistem hukum dan kelembagaan yang belum memadai disertai implementasinya yang lemah, dan birokrasi yang beretos kerja rendah serta sarat KKN
5. Perilaku pengusaha yang hanya memburu keuntungan dengan mempertahankan sistem pemasaran yang menguntungkan pedagang perantara dan pengusaha
6. Rendahnya kesadaran akan arti penting nilai strategis pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu bagi kemajuan dan kemakmamuran Akibatnya potret pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, dicirikan oleh dominan kegiatan yang kurang mengindahkan aspek kelestarian lingkungan

MANFAAT PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADU

Banyak faktor persoalan yang menyebabkan tidak optimal pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, tapi kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Padahal karakteristik dan alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu samal lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu suatu hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu. Apabila perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan pembangunan nasional.

Keunggulan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir atau para pengguna sumberdaya pesisir dan lautan untuk membangun sumberdaya pesisir dan lautan secara berkelanjutan, melalui pendekatan secara terpadu.
2. Melibatkan masyarakat pesisir untuk memberikan aspirasi berupa msukan terhadap perencanaan pengelolaan kawasan pesisir dan laut baik sekarang maupun masa depan
3. Menyediakan kerangka yang dapat merespon segenap fluktuasi maupun ketidak-menentuan yang merupakan ciri khas pesisir dan lautan
4. Membantu pemerintah daerah maupun pusat dengan proses yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi lokal berbasis sumberdaya lokal.

Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu memerlukan informasi tentang potensi pembangunan yang dapat dikembangkan di suatu wilayah pesisir dan lautan beserta permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya ditujukan untuk mendapatkan pemanfaatan sumberdaya

dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat diwilayah ini secara berkelanjutan dan optimal bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu rumusan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu disusun berdasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi aktual yang ada dengan mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional. Untuk mengimplementasikan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang terpadu maka ada empat strategi yaitu:

Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Suatu kawasan pembangunan yang berkelanjutan memiliki empat dimensi yaitu: ekologis, sosial-ekonomi-budaya, sosial-politik, dan hukum serta kelembagaan. Dimensi ekologis menggambarkan daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan dalam menopang setiap pembangunan dan kehidupan manusia. Dimensi ekonomis sosial dari pembangunan berkelanjutan yaitu permintaan terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di mana manfaat dari pembangunan wilayah pesisir seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal sekitar program terutama yang termasuk ekonomi lemah, Dimensi sosial-politik. pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju keruskan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penegakan dimensi hukum dan kelembagaan, sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan kuat akan mengendalikan setiap orang untuk tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan.

Mengacu Pada Prinsip-prinsip Dasar Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan

Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir harus mengacu pada prinsip prinsip dasar pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, ada 15 prinsip dasar yang sebagian besar mengacu Clark (1992) yaitu:

a) Wilayah pesisir adalah suatu sistem sumberdaya yang unik, yang memerlukan pendekatan khusus dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya.
b) Air merupakan faktor kekuatan pemersatu utama dalam ekosistem pesisir.
c) Tata ruang daratan dan lautan harus direncanakan dan dikelola secara terpadu.
d) Daerah perbatasan laut dan darat hendaknya dijadikan faktor utama dalam setiap program pengelolaan wilayah pesisir.
e) Batas suatu wilayah pesisir harus ditetapkan berdasarkan pada isudan permasalahan yang hendak dikelola serta bersifat adaptif,
f) Fokus utama dari pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk mengkonservasi sumberdaya milik bersama.
g) Pencegahan kerusakan akibat bencana alam dan konservasi sumber daya alam harus dikombinasikan dalam suatu program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
h) Semua tingkatan di pemerintahan dalam suatu negara harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir.
i) Pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam adalah tepat dalam pembangunan wilayah pesisir
j) Evaluasi pemanfaatan ekonomi dan sosial dari ekosistem pesisir serta partisipasi masyarakat lokal dalam program pengelolaan wilayah pesisir
k) Konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

l) Pengelolaan multiguna sangat tepat digunakan untuk semua sistem sumberdaya wilayah pesisir.
m) Pemanfaatan multiguna merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan
n) Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional harus dihargai
o) Analisis dampak lingkungan sangat penting bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu

Proses perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya ada tiga langkah utama, yaitu:

a. Perencanaan
b. Implementasi
c. Pemantauan
d. Evaluasi

Elemen dan Struktur Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan

Agar mekanisme atau proses pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dapat direalisasikan dengan baik perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang diramu dalam suatu piranti pengelolaan sebagai raganya. Pada intinya piranti pengelolaan terdiri dari piranti kelembagaan dan alat pengelolaan Piranti kelembagaan menyediakan semacam kerangka bagi pelaksanaan tugas-tugas pegelolaan dan penerapan segenap alat pengelolaan.

Environment Doomsday.

Sekalipun komitmen, kebijakan, arah, strategi, program aksi, kerjasama global untuk menanggulangi kerusakan lingkungan telah dirumuskan dan disepakati untuk diimplementasikan namun dari penelitian dan fakta alami terjadi, ternyata ancaman kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan semakin mengerikan dan semakin rumit untuk diuraikan dan diselesaikan. Contoh yang begitu menyentak adalah fenomena perubahan iklim akibat adanya global warming yang menyebabkan banjir, badai, kekeringan, suhu udara yang tidak menentu di berbagai belahan dunia yang begitu ekstrim, gelombang laut yang besar. Negara kaya dan miskin terkena dampaknya. Sumber petaka tersebut belum memperhitungkan bencana yang diakibatkan oleh dinamika kulit dan isi burni seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami, ini juga terjadi di kawasan pesisir Kawasan pesisir pada dasarnya adalah merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara bio - geofisik maupun sosial ekonomi. Kawasan ini terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang/jasa bagi komunitas pesisir dan pemanfaatan lainnya. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, pesisir merupakan kawasan strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi primer mover pembangunan nasional.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang di dukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,

sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan dan keseluruhan dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor daerah yaitu:

a. *Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*
   Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur dan spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas.
b. *Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam*
   Tujuan dari program adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, air udara, dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang terkendali dan eksploitatif
c. *Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.*
   Tujuan Program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
d. *Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*
   Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya berkeadilan.

Kelemahan Strategis Dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Indonesia

1. Energi nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tercurah habis untuk pengembangan proses demokrasi yang kurang sehat, sehingga hal-hal yang strategis dan berdampak luas dan menjangkau lintas generasi kurang mendapat perhatian dan dukungan politis. Sebagai contoh masalah lingkungan hidup, pendidikan warga negara yang cinta tanah air
2. Kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang sudah cukup baik dalam formulasinya ternyata tidak dibarengi dengan implementasi yang baik

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakan dan pencemaran lingkungan hampir tidak ada sanksinya
4. Minimnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi mengenai lingkungan hidup

PENUTUP

Masalah lingkungan hidup Indonesia yang dikelola secara ceroboh dan pembangunan wilayah yang tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang secara seimbang akan menyebabkan kerusakan hasil investasi, harta benda, kawasan pesisir dan lautan yang cenderung meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Sementara alokasi anggaran rehabilitasi kerusakan lingkungan semakin tidak seimbang dengan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diexploitir. Sementara kesadaran dan keseriusan para pengambil keputusan dalam memperhatikan dan mengimplementasikan kebijakan dan komitmen dalam sektor lingkungan hidup sangatlah tidak memadai. Banyak komitmen nasional dan global di bidang lingkungan hidup yang sasarannya jelas tidak tercapai. Ada gap yang besar antara rumusan kebijakan dengan operasionalnya. Diperlukan kemauan yang keras, tidak kenal lelah, dan mendasar untuk menempatkan perhatian dan kebijakan yang pro lingkungan hidup khususnya para elit jika berada di legislatif, eksekutif maupun judikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Susanto, Lingkungan Hidup Sumber Daya Atau Sumber Petaka.

Diposaptono S, Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia, Direktorat Bina Pesisir - Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DKP, 2002.

Penanaman Global Harus Di Antisipasi, Rubrik Lingkungan Harian Media Indonesia Edisi Rabu, 16 Oktober 2002.

Sudarmaji, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah, Seminar Nasional Dies UGM ke-58,27 Oktober 2007

Soemarwoto Otto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, 1991, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007

Wahyuningsih Darajati, Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan, Makalah Sosialisasi Nasional MFCPP, 22 September 2004.

21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Anzori Tawakal, Asâ€™ad Hasan. PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebija... Crossref	5%
2	Rani Hafsaridewi, Benny Khairuddin, Jotham Ninef, Ati Rahadiati, Hasa... Crossref	5%
3	Hartati Hartati. "Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas... Crossref	4%
4	NFN Widayatun. "SATU DEKADE PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MAN... Crossref	2%
5	Martini Djamhur, Mennofatria Boer, Dietriech G. Bengen, Achmad Fahr... Crossref	1%
6	Alfa Srianti. "DAMPAK REKLAMASI PANTAI TERHADAP KONDISI SOSI... Crossref	1%
7	Dandy Marcelino. "Green Purchase Intention Pada Konsumen Nutrifoo... Crossref	<1%
8	Kemhay Djalaludin, Deni Sarianto, Istraianto Kadi. "DAERAH PENANGK... Crossref	<1%
9	Pieter Th Berhitu. "ANALISIS ZONASI UNTUK PENGELOLAAN KAWASA... Crossref	<1%

10 Husain Latuconsina. "Dampak pemanasan global terhadap ekosistem ... <1%
Crossref

11 Bayu Aji Krisna, Syamsul Alam Paturusi, Ida Bagus Gde Wirawibawa. "K... <1%
Crossref

12 Irpan Ilmi. "Ekonomi Hijau Sebagai Strategi SMK Bakti Karya Parigi Me... <1%
Crossref